

MODEL DESA MANDIRI BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT STUDI DI DESA TOLUTU KECAMATAN TOMINI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Abdul Mamat Bidjuni¹, Lisda Van Gobel², Misbahudin Djaba³

^{1,2,3}Universitas Bina Taruna Gorontalo

mamatbidjuni@gmail.com, lisdavangobel69@gmail.com,

misbahudindjaba014@gmail.com

Received: 10-06-2025

Revised: 18-06-2025

Approved: 24-06-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan pembangunan di Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi sebagai sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme musyawarah desa telah diterapkan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, partisipasi aktif warga masih tergolong rendah akibat kurangnya pemahaman, waktu pelaksanaan musyawarah yang tidak sesuai dengan aktivitas warga, minimnya sosialisasi, serta apatisme akibat usulan yang jarang ditindaklanjuti. Selain itu, keterbatasan pelatihan dan akses informasi juga menjadi kendala dalam proses pemantauan dan pengawasan, sedangkan pengambilan keputusan sering diwarnai ketidaksepakatan dan dominasi pemerintah desa. Simpulan penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Tolutu masih bersifat formal dan belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pelibatan yang lebih efektif agar pembangunan desa dapat berjalan secara partisipatif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Musyawarah Desa, Pembangunan Desa, Pengambilan Keputusan

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat lokal. Konsep desa mandiri menjadi arah pembangunan yang menekankan pada kemampuan desa untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan. Hal ini Desa mandiri tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya, tetapi juga memiliki sistem pemerintahan desa yang kuat, ekonomi lokal yang berkembang, serta partisipasi masyarakat yang aktif. Desa Mandiri merupakan salah satu konsep pembangunan desa yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat kemandirian dan daya saing masyarakat desa. Selanjutnya, Status ini diperoleh oleh desa yang telah memenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam aspek sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Sehingga, Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, Program Desa Mandiri berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, Serta peningkatan layanan publik yang berkualitas untuk kalangan masyarakat agar mendapatkan layanan mudah untuk diakses para masyarakat (Nur Arifah & Kusumastuti, 2019).

Tabel 1.

Berikut Adalah Tiga Kebijakan Yang Mendukung Pengembangan Desa Mandiri Di Indonesia, Khususnya Relevan Untuk Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

No	Jenis Kebijakan	Isi Pokok	Sumber
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Menetapkan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan,	https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014

No	Jenis Kebijakan	Isi Pokok	Sumber
		pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.	
2	Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama	Mengatur transformasi pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDes Bersama untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.	https://peraturan.bpk.go.id/Details/199701/permendesa-pdtt-no-15-tahun-2021
3	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026	Menetapkan visi pembangunan daerah yang menekankan penguatan kapasitas desa melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi lokal.	https://jdih.bolselkab.go.id/asset/peraturan/5_PERATURAN_DAERAH_NOMOR_5_TAHUN_20221.pdf

Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah suatu pendekatan partisipatif dalam pembangunan pedesaan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal agar mampu mengenali, menganalisis, dan mengelola permasalahan serta potensi di lingkungannya secara mandiri. PRA memanfaatkan berbagai teknik seperti pemetaan sosial, diagram Venn, kalender musiman, dan diskusi kelompok terfokus untuk menggali pengetahuan lokal dan memperkuat peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Berbeda dengan pendekatan top-down yang bersifat instruktif, PRA mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan pembangunan. Dalam konteks pengembangan model desa mandiri berbasis partisipasi masyarakat di Desa Tolutu, pendekatan PRA sangat relevan karena dapat mengidentifikasi kebutuhan riil dan potensi lokal secara langsung dari warga desa. Melalui PRA, masyarakat Desa Tolutu dapat mengartikulasikan aspirasi mereka, merancang strategi pengelolaan sumber daya lokal, serta menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai setempat. Penerapan PRA dalam studi ini tidak hanya akan memperkuat otonomi desa, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun model desa mandiri yang berkelanjutan dan berakar pada partisipasi aktif warga. Dengan demikian, PRA bukan hanya alat analisis, tetapi juga jembatan menuju pemberdayaan dan kemandirian desa.

Salah satu pendekatan yang sangat relevan dalam pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat, khususnya melalui *model Participatory rural appraisal*, yaitu pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan warga desa secara aktif dalam merumuskan dan menjalankan program pembangunan agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil yang dicapai. *Participatory Rural Appraisal* (PRA) merupakan pendekatan penilaian kondisi desa yang dilakukan secara partisipatif. Secara umum, PRA dapat diartikan sebagai metode penyusunan dan pengembangan program operasional yang ditujukan untuk membangun wilayah pedesaan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Melalui metode ini, masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam perencanaan program, tetapi juga dalam menyusun kerangka kerja yang produktif serta kegiatan lainnya. Selain masyarakat, proses PRA juga melibatkan

fasilitator atau pihak eksternal yang berperan membantu pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini menghasilkan gambaran kondisi sosial desa, seperti peta potensi, permasalahan, peluang, serta kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat. Informasi ini kemudian menjadi dasar dalam merancang solusi, menyusun program kerja, serta melakukan evaluasi dan pemantauan secara bersama sesuai dengan potensi dan kemampuan lokal (Ahmad, 2018).

Tujuan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) pada prinsipnya ingin memberdayakan dan menguatkan pembangunan Desa. Khususnya masyarakat yang dianggap masih kurang mampu. Metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) diyakini mampu mendorong perubahan status sosial masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mencapai pemerataan dan menghindari kesenjangan sosial, PRA memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuan praktis yang bersifat jangka pendek, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan kemasyarakatan. Tujuan ini juga berperan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan diri. Kedua, tujuan strategis yang bersifat jangka panjang, yang menitikberatkan pada transformasi sosial melalui pendekatan pengembangan dan pendidikan masyarakat. Tujuan ini bertujuan menciptakan kemandirian dan produktivitas masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dinilai efektif dan mudah diterapkan karena mengedepankan prinsip serta teknik yang aplikatif. Melalui pendekatan ini, masyarakat didorong untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan. Peran fasilitator, baik dari lembaga eksternal maupun kalangan akademisi, bukan sebagai tokoh sentral, melainkan sebagai pendamping. Dalam program PRA, masyarakat desa menjadi aktor utama yang menentukan arah dan pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah beberapa sistem pendekatan PRA yang sering digunakan. Pertama, Sistem *top down* memiliki dasar program *need assessment* (penjajagan kebutuhan) masyarakat berdasarkan survey. Kedua, Sistem *Bottom up Planning* Hasil ketidakmandirian masyarakat pedesaan ketika diberlakukan sistem *top down* melahirkan evaluasi.

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah pendekatan yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan program pembangunan di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, fasilitator berperan penting dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal agar lebih berdaya. Fasilitator ini umumnya berasal dari lembaga yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM dapat berfungsi sebagai pendamping yang membantu menyusun rencana pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA). Implementasi PRA melibatkan berbagai teknik seperti pemetaan sosial, diagram venn, dan diskusi kelompok terfokus, yang dirancang untuk menggali informasi secara mendalam dan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga dalam merumuskan alternatif solusi yang tepat dan sesuai dengan konteks lokal. Kemudian, PRA menjadi alat yang penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap proses, PRA memastikan bahwa program dan kebijakan yang dihasilkan lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan, karena didasarkan pada pemahaman dan kebutuhan nyata dari masyarakat itu sendiri. Namun, pada kenyataannya, Desa Tolutu di Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan desa mandiri yang

berbasis partisipasi masyarakat. Beberapa fenomena yang terjadi antara lain: masih terbatasnya akses infrastruktur yang mendukung proses pembangunan, seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa, serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di desa tersebut.

Dalam konteks pembangunan pedesaan, pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) telah menjadi metode yang efektif untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses identifikasi masalah dan perencanaan solusi. PRA memungkinkan masyarakat untuk berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi kehidupan, serta merencanakan dan bertindak berdasarkan analisis tersebut. PRA berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan metode survei konvensional yang sering kali tidak mencerminkan realitas lokal secara akurat. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip partisipatif, PRA menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan, bukan sekadar objek. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk menganalisis kondisi mereka sendiri dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan. Menyikapi hal tersebut, diperlukan sebuah model desa mandiri yang tidak hanya bersandar pada intervensi pemerintah atau pihak luar, tetapi juga dibangun dari bawah melalui penguatan partisipasi masyarakat. Selain itu, model desa mandiri berbasis partisipasi masyarakat menjadi sangat relevan dan strategis untuk dikaji dan diterapkan di Desa Tolutu. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi dan rekomendasi pembangunan desa yang berkelanjutan, partisipatif, dan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat.

Penerapan model ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pembangunan desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap hasil pembangunan. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam proses pembangunan. Dengan demikian, model desa mandiri berbasis partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas pembangunan, tetapi juga memperkuat kemandirian dan keberlanjutan desa.

Tabel 2.
Persentasi Status Desa Pada 7 Desa di Kecamatan Tomini
Berdasarkan Indeks Desa Membangun

No	Kecamatan Tomini	Status Desa Mandiri				
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	Pakuku	3,20%	1,50%	-	-	-
2	Milangodaa	3%	5%	2,8%	-	-
3	Milbar	0,70%	2%	2,05%	-	-
4	Milangodaa Induk	7,05%	3%	-	-	-
5	Tolutu	-	6,00%	-	-	-
6	Milangodaa Utara	2,25%	2,25%	-	-	-
7	Botuliodu	3%	2,03%	1%	-	-

Sumber Data: Indeks Desa Membangun 2025

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari tujuh desa yang ada di Kecamatan Tomini, sebagian besar masih termasuk dalam kategori desa tertinggal bahkan sangat tertinggal. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor yang belum mendukung untuk menjadikan desa-desa tersebut sebagai desa mandiri. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, potensi desa dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu desa yang masih tergolong tertinggal adalah Desa Tolutu yang berada di wilayah Botuliodu. Desa ini memiliki jarak tempuh terjauh dibandingkan desa lainnya di kecamatan dan masih memerlukan peningkatan dalam bidang ekonomi, sosial, serta lingkungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Banyak warga desa yang tidak terlibat secara aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbangdes), baik karena keterbatasan informasi maupun karena merasa pendapat mereka tidak terlalu berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Proses perencanaan cenderung bersifat top-down dan hanya melibatkan sebagian kecil tokoh masyarakat atau aparat desa. Kondisi ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara program pembangunan yang direncanakan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Misalnya, beberapa warga menyatakan bahwa yang mereka butuhkan adalah perbaikan infrastruktur jalan usaha tani, ketersediaan air bersih, namun aspirasi tersebut tidak muncul dalam dokumen perencanaan desa. Hal ini memperkuat kesan bahwa forum musyawarah hanya bersifat formalitas dan tidak membuka ruang dialog yang setara. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi program desa juga sangat minim. Setelah program dilaksanakan, masyarakat sering kali tidak dilibatkan dalam proses penilaian efektivitas atau efisiensi kegiatan. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam evaluasi sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan desa. Kurangnya partisipasi ini dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat karena proses evaluasi menjadi tidak objektif dan tidak responsif terhadap kondisi lokal. Tanpa umpan balik langsung dari masyarakat, pemerintah desa berisiko melanjutkan program yang tidak efektif atau tidak tepat sasaran.

Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat desa juga masih sangat terbatas. Keputusan-keputusan penting sering kali diambil oleh kepala desa dan perangkatnya tanpa proses deliberatif yang inklusif. Hal ini menyebabkan kebijakan atau program desa sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, dan berdampak pada rendahnya tingkat keberlanjutan program. Salah satu dampak nyata dari rendahnya partisipasi ini terlihat dalam bidang pemberdayaan ekonomi, di mana masyarakat jarang dilibatkan dalam penentuan program pelatihan keterampilan, penyaluran bantuan untuk pelaku UMKM, serta arah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akibatnya, program yang dijalankan sering kali tidak relevan dengan potensi lokal dan kurang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara optimal. Kurangnya ruang partisipatif juga menjadikan masyarakat sekadar sebagai penerima manfaat pasif, bukan sebagai subjek pembangunan yang aktif dan berdaya.

KAJIAN TEORI

Fatmawati et al., (2020) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa sangat penting untuk diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam membangun desa mandiri di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tahapan analisis data yang dilakukan, adalah reduksi data, data display (penyajian data), dan conclusion drawing/ verification. Menurut Siregar, (2023) Partisipasi masyarakat menjadi peran penting dalam setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah. partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara kelompok maupun individu. Melalui partisipasi maka kepentingan masyarakat akan terakomodir. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumen. Saepudin, (2018) yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Bandung" Penelitian ini mengkaji tentang Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket, wawancara, Focus Group Discussion, observasi, dan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Penelitian ini bermanfaat sebagai sebuah bentuk evaluasi program terutama terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Selain itu, sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Bandung terutama Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) dalam mengimplementasikan program desa mandiri pangan.

Konsep Administrasi Publik

Administrasi mencakup suatu proses kerjasama yang dikerjakan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika diterapkan secara resmi dalam konteks organisasi, kerjasama ini diarahkan untuk mencapai tujuan organisasional. Dan juga adapun beberapa pendapat para ahli tentang pengertian dari administrasi, Menurut Hendrayady, (2011) bahwa "Administrasi merupakan proses yang dilakukan oleh sekelompok individu berdasarkan tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi, dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif." Kemudian, (Afriansyah, 2019) Administrasi Bahwa Kerjasama manusia yang berlandaskan pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan bersama sesuatu yang hanya eksis dalam konsep. Hal di dasarkan atas alasan bahwa begitu banyak kegiatan yang dapat terjadi dan atau diadakan dengan Mengikutsertakan individu dalam kolaborasi yang tidak dapat dianggap sebagai tindakan administratif. Berbicara mengenai administrasi publik yang selalu kita dengar di (medsos) media sosial tentang kerja yang dilakukan oleh pemerintahan, jadi pengertian dari administrasi publik secara umum adalah salah satu proses kerja sama yang di laksanakan oleh semua belah pihak aparatur negara untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan publik yang telah di tentukan sebelumnya. Menurut (Engkus, 2017) administrasi publik mempunyai variasi makna. ada yang menterjemah (pentadbiran awam) dalam bahasa indonesia adalah administrasi Publik sebagai administrasi negara atau administrasi dari publik. ada pentadbiran untuk orang ramai atau pentadbiran

untuk orang ramai, malah ada yang melihatnya sebagai pentadbiran oleh orang ramai atau pentadbiran oleh orang ramai. Dimensi administrasi publik menurut Keban (2014) garis besar dapat dijelaskan melalui uraian berikut ini.

Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari istilah bahasa Inggris “participation” yang merujuk pada keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan atau organisasi, baik secara emosional maupun dalam bentuk keikutsertaan langsung. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam berbagai tahapan pembangunan, termasuk dalam proses penentuan arah dan strategi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan demikian, partisipasi juga mencerminkan peran serta masyarakat dalam menentukan dan mendukung jalannya pembangunan (Ngongare et al., 2019). Menurut Juliantara (2004) dalam (Chotijah & Pratiwi, 2019) partisipasi dimaknai dengan keterlibatan setiap warga Negara yang memiliki hak dalam membuat keputusan, secara langsung ataupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, Adapun New Economic Foundation yang artinya “Landasan Ekonomi Baru” (2001) dalam (Mardiyanta, 2013) merumuskan tangga partisipasi--dari yang terendah sampai tertinggi--sebagai berikut:

- 1) Manipulasi, pemerintah memberikan informasi, dalam banyak hal berupa informasi dan kepercayaan yang keliru (false assumption), kepada warga. Dalam beberapa hal pemerintah melakukan mobilisasi warga yang mendukung/dibuat mendukung keputusannya untuk menunjukkan bahwa kebijakannya populer (memperoleh dukungan)
- 2) Penentruman, pemerintah memberikan informasi dengan tujuan agar warga tidak memberikan perlawanan atas keputusan yang telah ditetapkan. Pemberian informasi sringkali didukung oleh pengerahan kekuatan (baik hukum maupun psikologis).
- 3) Sosialisasi, pemerintah memberikan informasi mengenai keputusan yang telah dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut.
- 4) Konsultasi, pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan.
- 5) Kemitraan, masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama dengan pemerintah.
- 6) Pendelegasian kekuasaan, pemerintah mendelegasikan keputusan untuk ditetapkan oleh warga.
- 7) Pengawasan oleh warga, warga memiliki kekuasaan mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dewi, (2013) mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahap proses penyelenggaraan pembangunan, dari perencanaan awal hingga pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, masyarakat bukan sekadar menerima fasilitas dan manfaat, melainkan menjadi subjek pembangunan yang berlangsung secara berkelanjutan. Menurut (Ricky Wirawan, Mardiyono, 2015) Keputusan anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk tindakan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dilakukan di komunitas lokal, adalah apa yang membentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah pedesaan. Adapun pendapat lain

dari Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli, yang dikembangkan kembali oleh (Ngongare et al., 2019:3). Yaitu :

- 1) Partisipasi berarti bahwa apa yang kita lakukan adalah bagian dari upaya bersama yang dilakukan bahu membahu dengan sesama warga negara dan rekan senegara untuk membangun masa depan bersama.
- 2) Partisipasi juga berarti bekerja untuk mencapai tujuan bersama di antara semua warga negara yang memiliki latar belakang keyakinan yang beragam dalam negara Pancasila kita, atau sebuah dasar hak dan kewajiban yang setara untuk berkontribusi dalam penciptaan masa depan baru bagi bangsa kita.
- 3) Partisipasi tidak hanya berarti ikut serta dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti berkontribusi sehingga dalam pemahaman kita tentang pembangunan, nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita keadilan sosial kita ditegakkan.
- 4) Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong pembangunan yang selaras dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan nasional yang melestarikan alam sebagai lingkungan hidup bagi manusia dan generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif. Sebuah studi deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran keseluruhan subjek yang sedang diperiksa. Ketika penelitian dilakukan menggunakan pendekatan metode kualitas, sumber informasi atau data dan perspektif melipat digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan apa yang dikatakan, dipahami, dan dilakukan. Data empiris dikumpulkan melalui informasi dan keterlibatan, bukan oleh pendapat peneliti. Sebaliknya, itu didasarkan pada gejala seperti yang diamati, dirasakan, dan dipikirkan (Adlini.et.al.,2022).

Sumber utama data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan perbuatan, dengan data tambahan berupa dokumen (Daniel & Harland, 2017). Oleh karena itu, penelitian menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder yang berasal dari publikasi seperti buku, laporan, dan surat kabar. Teknik pengumpulan data meliputi observasi untuk mengamati langsung tugas yang dilakukan, wawancara dengan informan kunci dan pendukung seperti kepala desa, sekretaris, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, serta dokumentasi untuk memperoleh informasi terkait faktor penghambat Desa Tolutu menuju desa mandiri di Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Suprayogi et al., 2022). Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap utama menurut Miles dan Huberman (1992): reduksi data dengan menyederhanakan dan memilih data relevan, penyajian data secara sistematis dalam bentuk tabel atau narasi untuk memudahkan analisis, serta pengambilan keputusan sebagai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan menentukan rekomendasi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan desa adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah-langkah

pembangunan desa dalam jangka waktu tertentu, dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan desa adalah fondasi penting dalam pembangunan desa. Tanpa perencanaan yang baik dan partisipatif, pembangunan desa bisa tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan.

Berikut hasil wawancara, tanggal 19 juni 2025 dengan informan kunci (MRP) selaku kepala desa, mengatakan bahwa :

“Memang selama ini, proses perencanaan pembangunan desa di Desa Tolutu telah saya laksanakan secara partisipatif melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga perwakilan kelompok tani dan nelayan. Namun, saya mengakui bahwa masih ada beberapa kendala yang menyebabkan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal dalam proses perencanaan. Salah satunya adalah minimnya pemahaman, sehingga mereka menganggap bahwa perencanaan adalah urusan pemerintah desa saja. Selain itu, ada kesibukan warga dalam kegiatan pertanian dan mata pencaharian sehari-hari juga menjadi alasan rendahnya kehadiran mereka dalam forum-forum resmi desa”.

Adapun penjelasan diatas dengan Informan Kunci menunjukkan bahwa selama ini ia telah menjalankan proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes), dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh adat, pemuda, perempuan, serta kelompok tani dan nelayan. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih rendahnya pemahaman warga mengenai pentingnya partisipasi dalam proses tersebut, sehingga mereka menganggap bahwa perencanaan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah desa. Selain itu, padatnya aktivitas masyarakat dalam pekerjaan sehari-hari, terutama di bidang pertanian, turut memengaruhi tingkat kehadiran dan keterlibatan mereka dalam forum-forum resmi desa.

Berikut hasil wawancara, tanggal 19 juni 2025 dengan informan pendukung (MRP) selaku sekretaris desa, mengatakan bahwa :

“Sepengalaman saya, melihat perencanaan pembangunan di Desa Tolutu telah dilakukan secara aktif dengan mengundang berbagai macam unsur masyarakat seperti tokoh adat, pemuda, perempuan, dan kelompok lainnya, di mana masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan usulan dan kebutuhan pembangunan. Akan tetapi, masih ada ketidakikutsertaan masyarakat yang tergolong rendah karena beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman warga tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam perencanaan serta anggapan bahwa hal tersebut adalah urusan pemerintah desa semata. kemudian, waktu pelaksanaan musyawarah yang sering berbenturan dengan aktivitas warga juga turut menjadi penyebab rendahnya partisipasi”.

Informasi diatas menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Desa Tolutu sudah berusaha melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh adat, pemuda, perempuan, dan kelompok lainnya dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah, kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses perencanaan. Banyak warga yang belum menyadari bahwa keterlibatan mereka sangat berpengaruh terhadap arah dan hasil pembangunan desa. Adanya anggapan keliru bahwa perencanaan pembangunan sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah desa, sehingga masyarakat merasa

tidak perlu terlibat atau memberikan pendapat. Waktu pelaksanaan musyawarah yang tidak sesuai dengan waktu luang masyarakat, sering kali berbenturan dengan aktivitas harian mereka (seperti bekerja atau bertani), sehingga membuat mereka tidak bisa hadir.

Dalam memperdalam wawancara, peneliti lanjut dengan Informan Pendukung (NI) selaku Ketua BPD, Ia menegaskan Bahwa :

“Kalau saya sih, melihat jalannya proses perencanaan pembangunan di Desa Tolutu telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa (musdes) yang diawali dari musyawarah dusun untuk menjaring aspirasi masyarakat. Hasil musyawarah kemudian dibawa ke tingkat desa dan dibahas bersama antara pemerintah desa, BPD, dan perwakilan warga. Saya sebagai BPD berperan aktif dalam mengawasi serta memastikan bahwa usulan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Namun, terkadang masih ada sebagian masyarakat tidak ikutserta dalam proses perencanaan pembangunan desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang sering terjadi, terutama minimnya pemahaman warga tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan serta anggapan bahwa urusan desa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu, kesibukan masyarakat, khususnya yang bekerja sebagai petani dan nelayan, juga menjadi hambatan dalam kehadiran mereka di forum-forum desa”.

Dari wawancara informan pendukung ini, terlihat bahwa Perencanaan pembangunan di Desa Tolutu sebenarnya sudah dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa (musdes). Proses ini dimulai dari musyawarah di tingkat dusun, tempat warga bisa menyampaikan aspirasi dan usulan. Hasilnya lalu dibahas di tingkat desa oleh pemerintah desa, BPD, dan perwakilan warga. Anggota BPD menyatakan bahwa dirinya ikut aktif dalam mengawasi jalannya perencanaan dan memastikan bahwa usulan yang dipilih memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa BPD berperan penting dalam proses pembangunan desa. Namun, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya maksimal. Masih ada warga yang tidak ikut serta dalam musyawarah karena beberapa alasan, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya keterlibatan mereka, dan anggapan bahwa pembangunan adalah tugas pemerintah saja. Selain itu, kesibukan sebagai petani dan nelayan juga membuat mereka sulit hadir dalam kegiatan desa.

Selanjutnya dengan informan pendukung (RL) selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

”Menurut saya, kalau berbicara persoalan proses pembangunan desa selama ini sudah dilakukan musyawarah desa (musdes) yang melibatkan aparat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga untuk membahas kebutuhan pembangunan seperti infrastruktur dan pemberdayaan. Namun, lagi dan lagi partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dikarenakan ada kendala, khususnya kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keikutsertaan mereka dalam program pembangunan. Setelah itu, waktu pelaksanaan musyawarah yang sering tidak sesuai dengan aktivitas harian warga seperti pergi bertani, melaut serta informasi tentang pelaksanaan musyawarah tidak tersebar merata. Hal ini membuat sebagian warga merasa bahwa perencanaan pembangunan merupakan urusan pemerintah desa semata, sehingga enggan atau ragu untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung”.

Simpulan Peneliti Pandangan tokoh masyarakat memperkuat bahwa meskipun selama ini proses pembangunan di desa sudah dilaksanakan melalui mekanisme

Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan berbagai elemen seperti aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Namun tingkat partisipasi aktif masyarakat masih rendah. Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab rendahnya keterlibatan warga dalam perencanaan pembangunan. Pertama, masih banyak warga yang belum memahami pentingnya peran serta mereka dalam proses pembangunan desa. Kedua, pelaksanaan musyawarah sering tidak mempertimbangkan waktu aktivitas harian masyarakat, seperti bertani atau melaut, sehingga mereka tidak bisa hadir. Ketiga, penyebaran informasi tentang musyawarah belum merata, sehingga tidak semua warga mengetahui kapan dan di mana musyawarah akan dilaksanakan.

Terakhir dengan masyarakat umum (ID) status warga desa tolu, dengan pernyataannya bahwa:

"Saya, sebagai masyarakat beranggapan bahwa memang Selama ini, proses perencanaan pembangunan desa di Desa Tolu dilakukan dengan baik melalui musyawarah desa yang dilibatkan adalah perangkat desa dan perwakilan masyarakat seperti tokoh adat, pemuda, dan ibu-ibu PKK. Akan tetapi, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah karena beberapa faktor. Pertama, banyak warga yang hadir hanya secara formalitas tanpa benar-benar menyampaikan pendapat, sebab mereka merasa keputusan telah ditentukan sebelumnya atau aspirasi mereka tidak terlalu diperhatikan. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses perencanaan juga menjadi hambatan, ditambah dengan minimnya sosialisasi dari pemerintah desa. Sebagian warga juga merasa apatis karena usulan mereka jarang ditindaklanjuti, dan faktor kesibukan dalam pekerjaan sehari-hari seperti bertani dan melaut membuat mereka enggan atau tidak sempat mengikuti kegiatan perencanaan desa secara aktif".

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Desa Tolu sebenarnya sudah berjalan cukup baik karena dilakukan melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah ini, perangkat desa dan beberapa perwakilan masyarakat seperti tokoh adat, pemuda, dan ibu-ibu PKK memang dilibatkan. Namun, meskipun mekanismenya sudah sesuai, tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan masih tergolong rendah. Ada beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya partisipasi ini. Pertama, banyak warga yang datang ke musyawarah hanya untuk memenuhi kehadiran secara formalitas, tanpa benar-benar menyampaikan pendapat. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa keputusan sudah ditentukan sebelumnya atau bahwa pendapat mereka tidak akan terlalu dipertimbangkan. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya keterlibatan dalam proses perencanaan juga menjadi faktor penghambat. Sosialisasi dari pemerintah desa yang masih minim memperburuk kondisi ini. Selain itu, ada juga rasa kecewa dan apatis dari masyarakat karena usulan yang mereka sampaikan jarang ditindaklanjuti. Di sisi lain, aktivitas sehari-hari masyarakat seperti bertani dan melaut membuat mereka kesulitan untuk menyisihkan waktu guna berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara dengan informan menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Tolu secara umum telah dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh adat, pemuda, perempuan, kelompok tani, nelayan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan aparat desa. Meskipun secara prosedural proses ini

sudah berjalan dengan baik dan terbuka, namun tingkat partisipasi aktif masyarakat masih tergolong rendah. Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh para informan, meliputi: Pertama, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam proses perencanaan. Banyak warga masih menganggap bahwa pembangunan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah desa. Kedua, Waktu pelaksanaan musyawarah yang tidak selaras dengan aktivitas harian masyarakat seperti bertani atau melaut, sehingga menyulitkan kehadiran mereka. Ketiga, Sosialisasi yang belum merata mengenai waktu dan tempat musyawarah, menyebabkan tidak semua warga mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut. Keempat, Anggapan bahwa musyawarah bersifat formalitas, di mana keputusan dianggap telah ditentukan sebelumnya, sehingga warga merasa pendapat mereka tidak akan berpengaruh. Kelima, Rasa kecewa dan apatis masyarakat akibat dari usulan-usulan yang pernah disampaikan namun tidak ditindaklanjuti, menjadikan mereka enggan untuk terlibat kembali dalam proses perencanaan. Dan keenam, Rendahnya tingkat pendidikan turut mempengaruhi kemampuan warga untuk memahami serta terlibat aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan.

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi penting untuk memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan dapat diperbaiki jika terjadi penyimpangan. Dalam konteks desa, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi juga menjadi alat untuk belajar dari pengalaman, memperbaiki perencanaan berikutnya, dan membangun budaya pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis bukti.

Berikut hasil wawancara, tanggal 19 juni 2025 dengan informan kunci (MRP) selaku kepala desa, mengatakan bahwa :

“Kami telah berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam memantau pelaksanaan program pembangunan desa dilakukan secara terbuka dan partisipatif melalui musyawarah desa dan forum diskusi komunitas. Masyarakat juga kami beri ruang untuk ikut serta sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, dengan melibatkan berbagai elemen seperti BPD, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan. Akan tetapi, masih terdapat masalah dalam proses pemantauan, seperti kurangnya kepaahaman masyarakat terkait mekanisme pengawasan dan pengelolaan anggaran desa, serta minimnya pelatihan yang membuat warga belum percaya diri untuk menyuarakan pendapat. Bukan hanya itu saja, ada sikap apatis sebagian masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Oleh karena itu, kami pemerintah desa terus mendorong edukasi dan sosialisasi agar warga semakin proaktif dan merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam pembangunan desa”.

Menurut Peneliti, wawancara ini dengan Informan Kunci menunjukkan bahwa Pemerintah desa berusaha melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, lewat musyawarah dan diskusi bersama. Warga diajak berpartisipasi bersama BPD, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan. Namun, masih ada kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara mengawasi program dan anggaran desa, serta minimnya pelatihan yang membuat warga kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, sikap cuek dari sebagian warga dan keterbatasan SDM juga menjadi tantangan. Karena itu, pemerintah desa terus

melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih aktif dan merasa ikut bertanggung jawab dalam pembangunan.

Berikut hasil wawancara, tanggal 19 juni 2025 dengan informan pendukung (MRP) selaku sekretaris desa, mengatakan bahwa :

“Kalau saya sih, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pemantauan pelaksanaan program pembangunan desa melalui berbagai forum partisipatif seperti musyawarah desa, rapat dusun, dan pembentukan kelompok kerja masyarakat (Pokmas) yang turut mengawasi jalannya kegiatan serta penggunaan anggaran. Pelibatan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan rasa memiliki di kalangan warga terhadap pembangunan yang berlangsung. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya pemahaman teknis masyarakat terhadap indikator pembangunan, serta kurangnya partisipasi dari sebagian warga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya peran mereka dalam pengawasan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa terus berupaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan agar model desa mandiri berbasis partisipasi masyarakat dapat terwujud secara optimal”.

Informasi dari Sekretaris Desa menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan program pembangunan desa sudah dilakukan secara aktif melalui berbagai forum partisipatif seperti musyawarah desa, rapat dusun, dan pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat (Pokmas). Tujuan dari pelibatan ini adalah untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan program serta menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman teknis masyarakat terhadap indikator pembangunan, serta minimnya partisipasi dari sebagian warga yang belum menyadari pentingnya peran mereka dalam proses pengawasan. Menyadari hal tersebut, pemerintah desa terus berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat. Diharapkan, melalui langkah-langkah ini, pembangunan desa yang berbasis partisipasi masyarakat dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam memperdalam wawancara, peneliti lanjut dengan Informan Pendukung (NI) selaku Ketua BPD, Ia menegaskan Bahwa :

“Dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Tolutu, masyarakat dilibatkan secara aktif melalui musyawarah desa dan forum diskusi terbuka yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan BPD. Partisipasi ini diwujudkan dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan serta turut serta dalam proses pengawasan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Saya, juga membentuk tim pengawas partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Namun, dalam praktiknya, pelibatan masyarakat ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pelaksanaan dan pengawasan program, serta keterbatasan sumber daya manusia yang mampu memahami dokumen teknis. Selain itu, komunikasi yang kurang lancar antar pihak kadang menimbulkan kesalahpahaman, meskipun upaya perbaikan melalui sosialisasi dan pelatihan terus dilakukan agar partisipasi

masyarakat semakin efektif dalam mewujudkan desa mandiri berbasis partisipasi”.

Dari wawancara ini, terlihat bahwa Pemerintah Desa Tolutu telah berupaya menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Musyawarah desa dan forum diskusi terbuka menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan ikut mengawasi jalannya pembangunan. Bahkan, dibentuk pula tim pengawas partisipatif yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pemuda untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun, pelaksanaan partisipasi ini belum sepenuhnya optimal karena masih ada kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaksanaan program dan keterbatasan SDM yang memahami dokumen teknis. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antar pihak juga kadang menimbulkan kesalahpahaman. Meski begitu, pemerintah desa terus berupaya melakukan sosialisasi dan pelatihan guna meningkatkan kualitas partisipasi dan mewujudkan desa mandiri yang berbasis keterlibatan masyarakat.

Selanjutnya dengan informan pendukung (RL) selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

”Saya melihat di Desa Tolutu, pelibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaan program pembangunan desa sudah berjalan, terutama melalui forum musyawarah desa dan keterlibatan beberapa warga dalam tim pelaksana kegiatan maupun kelompok pengawas. Masyarakat dapat memberikan masukan, memantau progres kegiatan, serta menyampaikan kritik atau saran jika terdapat ketidaksesuaian. Namun demikian, proses pemantauan ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan informasi yang diterima masyarakat terkait detail pelaksanaan program, serta kurangnya partisipasi aktif dari seluruh lapisan warga. Terakhir Sikap apatis sebagian masyarakat dan minimnya pemahaman teknis dalam melakukan pengawasan juga menjadi hambatan”.

Berdasarkan Pandangan dari tokoh masyarakat sebagai informan pendukung memperkuat bahwa di Desa Tolutu sebenarnya telah terdapat upaya pelibatan masyarakat dalam proses pemantauan pelaksanaan program pembangunan desa. Hal ini terlihat melalui mekanisme musyawarah desa dan keikutsertaan beberapa warga dalam tim pelaksana kegiatan maupun kelompok pengawas. Warga diberikan ruang untuk menyampaikan masukan, memantau perkembangan kegiatan, serta mengutarakan kritik atau saran jika terdapat hal-hal yang dinilai tidak sesuai. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat ini belum berjalan secara optimal. Masih terdapat sejumlah kendala, antara lain terbatasnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai rincian pelaksanaan program. Selain itu, partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat juga belum sepenuhnya terwujud. Sebagian masyarakat bersikap apatis terhadap proses pembangunan, sementara yang lain kurang memiliki pemahaman teknis dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga membatasi efektivitas keterlibatan mereka.

Terakhir dengan masyarakat umum (ID) status warga desa tolotu, dengan pernyataanya bahwa:

”Saya sebagai Masyarakat Desa Tolutu, seperti yang disampaikan oleh beberapa informan tadi, saya, merasa cukup dilibatkan dalam pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan desa, terutama melalui forum musyawarah desa (musdes) yang memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat dan turut mengawasi jalannya kegiatan pembangunan seperti infrastruktur jalan, jembatan,

dan irigasi. Pelibatan ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap kemajuan desa. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pemantauan, seperti kurangnya informasi yang menyeluruh mengenai rincian program, keterbatasan pemahaman teknis di kalangan masyarakat, serta adanya rasa sungkan untuk menyampaikan kritik terhadap aparat desa. Hal-hal ini membuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan belum sepenuhnya maksimal meskipun secara formal sudah dilibatkan”.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Desa Tolutu menyatakan bahwa dirinya merasa telah cukup dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, khususnya dalam forum musyawarah desa (musdes). Forum ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta ikut serta dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi. Keterlibatan tersebut dinilai dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama atas kemajuan desa. Namun, meskipun secara formal masyarakat telah dilibatkan, terdapat beberapa kendala yang membuat partisipasi pengawasan belum optimal. Di antaranya adalah keterbatasan informasi yang diterima masyarakat mengenai rincian program pembangunan, minimnya pemahaman teknis yang dimiliki warga, serta adanya rasa sungkan atau segan untuk menyampaikan kritik kepada aparat desa. Faktor-faktor ini menghambat efektivitas masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program, meskipun semangat untuk terlibat sudah ada.

Berdasarkan kesimpulan umum sementara dari lima jenis informan, terlihat bahwa Pemerintah Desa Tolutu telah berupaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Partisipasi masyarakat difasilitasi melalui berbagai forum seperti musyawarah desa, rapat dusun, pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat (Pokmas), dan tim pengawas partisipatif. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan rasa memiliki terhadap pembangunan desa. Namun, implementasi partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Sejumlah kendala masih dihadapi, antara lain: rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan indikator teknis pembangunan, minimnya pelatihan atau edukasi, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya akses informasi program secara rinci, serta sikap apatis atau sungkan dari sebagian warga untuk mengkritisi kebijakan. Hambatan-hambatan ini mengurangi efektivitas peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan. Menyadari tantangan tersebut, pemerintah desa terus berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan warga, diharapkan proses pembangunan desa yang partisipatif dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama, bukan hanya segelintir pihak. Proses ini juga membentuk rasa keadilan dan kepercayaan antara warga dan pemerintah desa. Keputusan yang diambil secara kolektif cenderung lebih mudah diterima dan didukung oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih lancar dan efektif.

Berikut hasil wawancara, tanggal 19 juni 2025 dengan informan kunci (MRP) selaku kepala desa, mengatakan bahwa :

“Menurut saya, selama ini Dalam pemerintahan Desa Tolutu, proses pengambilan keputusan terutama terkait program pembangunan dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti BPD, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan. Partisipasi aktif warga menjadi kunci utama agar setiap keputusan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, tidak jarang terdapat kendala, terutama ketika usulan program dari pemerintah desa tidak sepenuhnya disetujui oleh warga karena perbedaan prioritas atau kurangnya pemahaman terhadap manfaat jangka panjangnya. Untuk itu kami telah mengatasi hal tersebut, kami selaku pemerintah desa selalu mengedepankan dialog terbuka dan pendekatan persuasif agar masyarakat tetap merasa dilibatkan dan keputusan yang diambil dapat diterima secara kolektif”.

Berdasarkan wawancara ini dengan Informan Kunci menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tolutu dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait program pembangunan, selalu berusaha melibatkan masyarakat secara luas melalui musyawarah desa (Musdes). Dalam forum ini, berbagai unsur masyarakat seperti BPD, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan turut diundang untuk memberikan pendapat. Hal ini dilakukan agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan warga. Namun, dalam praktiknya, tidak semua usulan program dari pemerintah desa langsung disetujui oleh masyarakat. Perbedaan pendapat sering muncul, terutama karena adanya perbedaan prioritas antar kelompok atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat jangka panjang dari program yang diusulkan.

Berikut hasil wawancara, tanggal 19 juni 2025 dengan informan pendukung (MRP) selaku sekretaris desa, mengatakan bahwa :

“Berbicara persoalan Proses pengambilan keputusan di Desa Tolutu, menurut saya, sudah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah desa. Setiap rencana program pembangunan dibahas bersama BPD, tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok perempuan untuk memastikan bahwa usulan yang muncul benar-benar mewakili kebutuhan warga. Keputusan diambil secara kolektif dengan mengedepankan prinsip mufakat, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang turut menentukan arah pembangunan desa. Namun, dilihat dilapangan dalam pelaksanaannya, kendala kadang muncul, terutama ketika ada keputusan pemerintah desa yang tidak sepenuhnya disetujui oleh sebagian warga. Misalnya, terdapat program yang dianggap kurang prioritas oleh kelompok tertentu”.

Informasi dari Sekretaris Desa menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di Desa Tolutu telah dilakukan secara partisipatif, yaitu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok perempuan melalui forum musyawarah desa. Tujuan dari pelibatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan warga. Keputusan diambil secara bersama (kolektif) dengan mengedepankan prinsip mufakat (kesepakatan bersama). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya penerima hasil pembangunan (objek), tetapi juga berperan aktif sebagai penentu arah pembangunan (subjek). Namun, dalam praktiknya di lapangan, masih ada kendala. Kadang terjadi ketidaksepakatan, terutama ketika keputusan yang diambil oleh pemerintah desa tidak sepenuhnya diterima oleh semua kalangan masyarakat. Misalnya, ada kelompok warga yang

menganggap suatu program pembangunan tidak sesuai prioritas, atau tidak terlalu penting dibandingkan kebutuhan lain yang lebih mendesak menurut mereka.

Dalam memperdalam wawancara, peneliti lanjut dengan Informan Pendukung (NI) selaku Ketua BPD, Ia menegaskan Bahwa :

“Kalau saya sih melihat bahwa pengambilan keputusan, khususnya terkait program pembangunan, dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan BPD. Setiap usulan diajukan dari tingkat dusun lalu dibahas dalam forum desa untuk kemudian dirumuskan ke dalam RKPDes dan dituangkan dalam APBDes. Akan tetapi, pelaksanaannya, tidak jarang muncul kendala, kecuali ketika ada keputusan pemerintah desa yang tidak melalui proses komunikasi atau musyawarah yang cukup sehingga tidak mendapat persetujuan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, saya BPD berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, memfasilitasi dialog agar tercapai kesepakatan bersama. Keterlibatan aktif semua pihak dan komunikasi terbuka menjadi kunci dalam menjaga agar proses pengambilan keputusan tetap berjalan secara inklusif dan tidak menimbulkan penolakan sosial”.

Dari wawancara ini, terlihat bahwa pengambilan keputusan di desa, khususnya yang berkaitan dengan program pembangunan, umumnya dilakukan secara partisipatif. Proses ini dimulai dari pengumpulan usulan di tingkat dusun, yang kemudian dibahas dalam musyawarah desa bersama masyarakat, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil dari musyawarah ini akan dirumuskan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak selalu berjalan lancar. Kadang-kadang, ada keputusan yang diambil sepihak oleh pemerintah desa tanpa melalui komunikasi atau musyawarah yang cukup, sehingga memunculkan ketidakpuasan dari masyarakat. Dalam situasi seperti ini, saya juga, menjalankan perannya sebagai penghubung atau mediator antara masyarakat dan pemerintah desa.

Selanjutnya dengan informan pendukung (RL) selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya, masyarakat Desa Tolutu, dilihat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan desa telah dilakukan melalui mekanisme (musdes) atau musyawarah desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh adat, pemuda, perempuan, dan kelompok tani. Pemerintah desa menyusun rencana program pembangunan berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi di lapangan, kemudian membahasnya secara terbuka dalam forum musyawarah. Keputusan diambil secara mufakat agar benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Namun disisi lain, tidak jarang muncul kendala ketika ada keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan warga, jika program yang diusulkan dinilai kurang prioritas. Dalam situasi seperti ini, biasanya terjadi perdebatan, tetapi dapat diatasi melalui dialog terbuka dan mediasi oleh para tokoh masyarakat. Saya sebagai tokoh masyarakat menegaskan pentingnya komunikasi dua arah dan transparansi agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat formalitas, melainkan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan model desa mandiri berbasis partisipasi masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menyatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan di Desa Tolutu, pemerintah desa telah melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui forum *musyawarah desa* (musdes). Elemen-

elemen masyarakat yang dimaksud mencakup tokoh adat, pemuda, perempuan, dan kelompok tani. Proses perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat yang ditemukan di lapangan, kemudian dibahas secara terbuka dalam musyawarah, dan keputusan diambil secara mufakat agar aspirasi masyarakat benar-benar terwakili. Namun, dalam praktiknya, tidak semua keputusan selalu diterima dengan mulus. Kadang-kadang, ada usulan program yang dianggap kurang penting oleh warga sehingga menimbulkan ketidaksepakatan. Jika situasi seperti ini terjadi, biasanya akan muncul perdebatan, tetapi bisa diatasi dengan cara dialog terbuka dan mediasi oleh tokoh masyarakat, yang bertindak sebagai penengah.

Terakhir dengan masyarakat umum (ID) status warga desa tolutu, dengan pernyataannya bahwa:

"Dalam pengalaman saya sebagai warga, melihat proses pengambilan keputusan di Desa Tolutu umumnya dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, kelompok pemuda, dan perwakilan perempuan. Pemerintah desa biasanya terlebih dahulu menyusun rencana program, lalu menyampaikannya dalam forum musyawarah untuk dibahas bersama. Kami sebagai warga diberikan kesempatan untuk memberikan saran, kritik, atau tambahan ide agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, meskipun inisiatif awal datang dari pemerintah desa, keputusan akhir biasanya merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun realitas dilapangan terdapat juga kendala, terutama jika keputusan yang diambil oleh pemerintah desa tidak melalui proses komunikasi yang terbuka atau dianggap tidak mencerminkan aspirasi warga. Misalnya, pernah ada program pembangunan jalan yang ditetapkan tanpa konsultasi terlebih dahulu, sehingga sebagian warga merasa tidak dilibatkan dan mempertanyakan manfaatnya. Akibatnya, muncul ketegangan dan proses pelaksanaan jadi tertunda karena ada penolakan".

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan di Desa Tolutu umumnya dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa. Forum ini melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan. Biasanya, pemerintah desa terlebih dahulu menyusun rencana program, lalu membawanya ke forum musyawarah untuk mendapatkan masukan dari warga. Warga diberi ruang untuk memberikan kritik, saran, atau ide tambahan agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, meskipun pemerintah desa menjadi inisiator, keputusan akhir diambil secara bersama-sama dengan masyarakat. Namun, di sisi lain, realitas di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Terkadang, pemerintah desa membuat keputusan tanpa komunikasi yang terbuka atau tanpa melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan warga karena merasa aspirasinya diabaikan. Contohnya, ada program pembangunan jalan yang ditetapkan tanpa melalui konsultasi terlebih dahulu, sehingga menimbulkan penolakan dan ketegangan di masyarakat. Akibatnya, pelaksanaan program pun mengalami hambatan atau keterlambatan.

Berdasarkan seluruh kesimpulan Dari lima jenis informan, terlihat bahwa Proses pengambilan keputusan di Desa Tolutu pada prinsipnya telah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan, dan kelompok tani melalui forum musyawarah desa (musdes). Pelibatan ini bertujuan agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan

dan aspirasi warga. Keputusan diambil secara kolektif dan berdasarkan prinsip mufakat, sehingga masyarakat berperan sebagai subjek dalam pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan partisipasi ini belum selalu berjalan ideal. Masih terdapat sejumlah kendala, seperti keputusan yang kadang diambil sepihak oleh pemerintah desa tanpa komunikasi terbuka, atau ketidaksepakatan atas usulan program yang dinilai tidak prioritas oleh sebagian warga. Situasi semacam ini dapat menimbulkan ketegangan atau penolakan, serta menghambat kelancaran pelaksanaan program pembangunan. Meskipun demikian, upaya penyelesaian biasanya dilakukan melalui dialog terbuka dan mediasi oleh tokoh masyarakat agar tercipta kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, model desa mandiri di Desa Tolutu sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam tiga tahapan utama pembangunan desa, yaitu perencanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Ketiga tahapan ini saling terkait membentuk siklus partisipatif yang berkelanjutan. Perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, namun partisipasi aktif masih rendah akibat kurangnya pemahaman, waktu pelaksanaan yang tidak sesuai, sosialisasi yang kurang merata, anggapan formalitas, kekecewaan terhadap tindak lanjut, dan rendahnya pendidikan. Dalam pemantauan dan evaluasi, masyarakat dilibatkan melalui forum seperti rapat dusun dan tim pengawas, namun kendala seperti minimnya pelatihan dan apatisme warga membatasi efektivitas partisipasi. Pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui musyawarah mufakat, namun terkadang kurang melibatkan masyarakat secara penuh, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan potensi penolakan. Model Desa Mandiri di Tolutu tidak hanya menekankan keterlibatan teknis masyarakat, tetapi juga aspek budaya dan kesadaran kolektif. Keunggulan model ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu meliputi kemandirian inisiatif dalam perencanaan tanpa ketergantungan eksternal, keterbukaan informasi yang mendukung kontrol sosial dalam evaluasi, serta budaya konsensus dalam pengambilan keputusan yang memperkuat legitimasi sosial dan politik. Kendala yang dihadapi masyarakat, seperti rendahnya pemahaman dan apatisme, menegaskan pentingnya pendidikan partisipasi sebagai proses pembelajaran demokrasi, agar warga merasa memiliki kendali dan pengetahuan dalam pembangunan desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Desa Tolutu sudah menunjukkan tingkat aktif yang relatif tinggi, meski masih perlu peningkatan agar proses pembangunan lebih efektif dan inklusif.

KESIMPULAN

Bahwa Implementasi prinsip Participatory Rural Appraisal (PRA) di Desa Tolutu belum sepenuhnya efektif meskipun telah disediakan ruang formal seperti Musyawarah Desa, forum pengawasan, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Keterlibatan masyarakat masih bersifat simbolis karena rendahnya pemahaman warga, ketidaksesuaian waktu pelaksanaan musyawarah, minimnya sosialisasi, serta kurang optimalnya tindak lanjut aspirasi. Forum pengawasan seperti Pokmas dan tim pengawas partisipatif telah dibentuk, namun partisipasi substantif masih terhambat oleh kendala teknis, kurangnya pelatihan, dan keterbatasan informasi. Pengambilan keputusan secara kolektif melibatkan berbagai elemen masyarakat, tetapi dalam praktiknya masih terdapat dominasi pemerintah desa dan ketidaksepakatan warga. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tolutu masih bersifat formal dan belum mencapai tingkat partisipasi yang bermakna dan berkeadilan sesuai prinsip PRA.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Afriansyah, H. (2019). *Administrasi Peserta Didik*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/NRXH8>
- Ahmad, Muhsin Darpito Surpiko Hapsoro, S. Y. (2018). Community-Based Poverty Alleviation Using Participatory Rural Appraisal. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 6(June), 496–504.
- Chotijah, F., & Pratiwi, R. M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba Di Garut. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 5(1), 160–176.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Engkus, E. (2017). ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 91–101. <https://doi.org/10.15575/jp.v7i1.1739>
- Fatmawati, Hakim, L., & Mappamiring. (2020). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(1), 15–21.
- Hendrayady, A. (2011). Reformasi Administrasi Publik. *Jurnal Fisip UMRAH*, 1(1), 107–113.
- Mardiyanta, A. (2013). State of the art: Konsep partisipasi dalam ilmu administrasi publik. *Masyarakat, Kebudayaan*, 26(/ No. 4 Published : 2013-10), 227–242.
- Ngongare, A., Rompas, W. Y., & Kiyai, B. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 5, 1–13.
- Nur Arifah, M., & Kusumastuti, N. (2019). Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri: Studi Di Desa Kemadang Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2(1), 169–188. <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-09>
- Ricky Wirawan, Mardiyono, dan R. N. (2015). Pembangunan Daerah. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Ricky*, 3(418), 11.
- Saepudin, E. (2018). Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Bandung. *Sosiohumaniora*, 20(1), 86. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i1.9895>
- Siregar, M. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mempertahankan Desa Mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 35–51. <https://doi.org/10.30742/juispol.V3i1.2889>